

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan efisiensi perekonomian untuk mampu menciptakan lapangan kerja dan menyelenggarakan kehidupan yang layak bagi semua orang, yang pada akhirnya akan membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia. Indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi yakni penurunan tingkat kemiskinan (Simatupang dan Saktyanu, 2003 dalam Wirawan & Arka, 2015).

Kemiskinan merupakan penyakit ekonomi yang harus disembuhkan atau setidaknya dikurangi. Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensi. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus bersifat komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu (M. Nasir dkk. 2008). Selain itu, penurunan pengangguran diharapkan juga mampu menurunkan jumlah kemiskinan. Orang-orang yang belum memiliki pekerjaan dituntut untuk segera mencari pekerjaan agar mampu keluar dari masalah kemiskinan. Menanggapi masalah pengangguran, pemerintah telah memberlakukan kebijakan untuk mengurangi angka pengangguran dan memberikan manfaatnya kepada pengangguran (Herbert, 1998).

Menurut BPS (2020), berdasarkan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan

dalam memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun nonmakanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang.

Kemiskinan tidak hanya menjadi masalah di negara-negara berkembang saja, negara-negara maju juga mengalami kemiskinan walaupun tidak sebanyak negara-negara berkembang. Permasalahannya sama, namun pengukurannya berbeda. Permasalahan kemiskinan di negara-negara maju merupakan bagian terkecil dari masyarakatnya, namun di negara-negara berkembang permasalahannya menjadi rumit, karena jumlah penduduk miskin mencapai hampir setengah dari jumlah penduduknya. Kemiskinan ditandai dengan keterbelakangan pembangunan dan pengangguran yang kemudian meningkat sehingga memicu ketimpangan pendapatan dan kesenjangan antar kelompok penduduk.

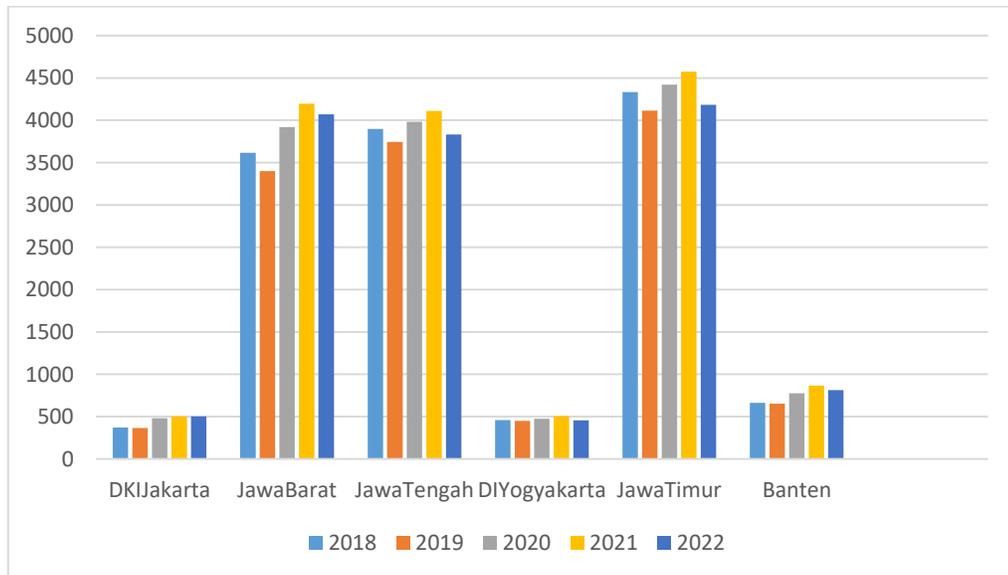
Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang dihadapkan pada masalah kemiskinan yang tidak bisa diabaikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sejumlah penduduk miskin di Indonesia pada saat September 2022 mencapai 26,36 juta jiwa, yang setara dengan 9,57%. Jumlah penduduk miskin ini naik menjadi 200.000 jiwa di bandingkan pada Maret 2022, akan tetapi lebih rendah dari September 2021. Menurut BPS, berdasarkan pulau kenaikan kemiskinan tertinggi terjadi di Maluku dan di Papua. Sedangkan penurunan jumlah penduduk miskin hanya terjadi di Sumatra pada September 2022 menjadi 5,76 juta jiwa. Adapun angka kemiskinan tertinggi tetap berada di pulau Jawa yang jumlahnya mencapai 13,94 juta jiwa.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan, strategi yang berbeda harus dibuat untuk memperkuat peran dan status perekonomian rakyat dalam perekonomian nasional. Kebijakan yang dipilih harus memihak dan mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan peningkatan ekonomi masyarakat. Selain itu, upaya pengentasan kemiskinan harus selalu didasarkan pada penentuan garis kemiskinan yang benar, dan pemahaman yang jelas tentang akar permasalahannya.

Saat ini baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai strategi dan kebijakan-kebijakan penanggulangan kemiskinan, namun masih jauh dari induk permasalahan atau dapat dikatakan bahwa strategi-strategi dan kebijakan yang dilaksanakan masih belum dapat dikatakan berhasil secara maksimal. Terlebih baru-baru ini tingkat kemiskinan di berbagai negara yang terdampak COVID-19 telah mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini dinyatakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat angka kemiskinan di Indonesia selama pandemi COVID-19 bertambah sebesar 2,76 juta jiwa menjadi 27,55 juta jiwa. Begitupun Provinsi Jawa Timur, yang saat ini telah menempati posisi peringkat ketiga dimana proporsi penduduk kota sebesar 40.665.7 jiwa, dan dengan besarnya proporsi penduduk tingkat kemiskinan di Jawa Timur tentu saja akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi negara.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita dan perbulan di bawah garis kemiskinan. Tinggi rendahnya penduduk miskin di negara Indonesia disebabkan pendapatan masyarakat perkapita yang rendah, pemasukan yang diterima masyarakat, pengeluaran masyarakat terhadap pendidikan,

serta kurang efektif dan efisien dalam pelaksanaan kesehatan yang disediakan dan dijalankan oleh pemerintah (Marbun, 2017). Berikut data jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa dalam 5 tahun terakhir.



Sumber: BPS Indonesia

Gambar 1.1

Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Jawa Tahun 2018-2022 (Ribu Jiwa)

Berdasarkan data diatas, provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Pulau Jawa terdapat pada Provinsi Jawa Timur dengan rata-rata penduduk miskin sebesar 4.323,6 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada tahun 2018 sebanyak 4.332,59 ribu jiwa mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 4.112,25 ribu jiwa. Salah satu faktor yang mendorong penurunan jumlah penduduk miskin yaitu beberapa komoditas makanan alami perubahan indeks harga konsumen (IHK). Peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).

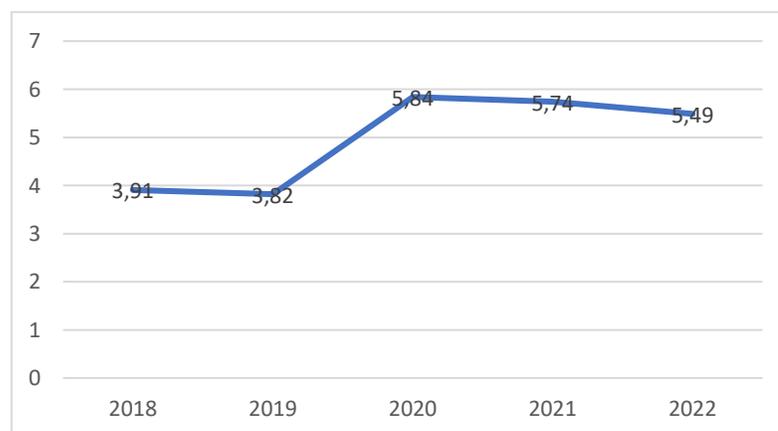
Berdasarkan komoditas makanan, beberapa komoditas yang memberikan kontribusi cukup besar pada garis kemiskinan makanan yaitu beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, gula pasir, tempe, dan tahu. Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 4.419,10 jiwa dan peningkatan sebesar 4.572,73 jiwa pada tahun 2021. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang berpotensi pada hilangnya lapangan kerja dalam jumlah besar sehingga meningkatkan angka kemiskinan. Sementara pada tahun 2022, kembali mengalami penurunan sebesar 4.181,29 jiwa. Penurunan kemiskinan tersebut didorong oleh peningkatan pendapatan penduduk miskin melalui kegiatan usaha produktif yang didukung adanya permodalan UMKM. Pangsa kredit UMKM terhadap total penyaluran kredit di Jawa Timur terus mengalami peningkatan sejak 2021. Beberapa program tersebut di antaranya Prokesra, KUR, dagulir serta fasilitasi pembiayaan lainnya.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang juga tidak terlepas dari masalah kemiskinan. Provinsi dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak di Pulau Jawa ini juga merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa. Masih tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan oleh pemerintah masih belum merata dan menyeluruh.

Permasalahan kemiskinan muncul karena dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan. Dalam hal ini, tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), upah

minimum, dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu faktor penyebab banyaknya penduduk miskin yaitu berapa banyak pengangguran di daerah tersebut.

Dalam menilai tingkat pengangguran, pemerintah meninjau melalui indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Sedangkan pengangguran adalah kondisi ketika seseorang berada pada golongan angkatan kerja namun mereka sedang berusaha mendapatkan pekerjaan dan belum mendapatkan pekerjaan tersebut (Aprilia, 2016). Tingkat pengangguran juga dijadikan sebagai indikator untuk menilai sejauh mana kinerja ekonomi suatu negara. Pengangguran sering memicu timbulnya berbagai masalah ekonomi, karena ketika pengangguran terjadi maka pendapatan dari masyarakat akan menurun sehingga masyarakat tidak mampu untuk melakukan produktivitas (Yacoub, 2012). Berikut data tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur dalam 5 tahun terakhir.



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur (2022)

Gambar 1.2

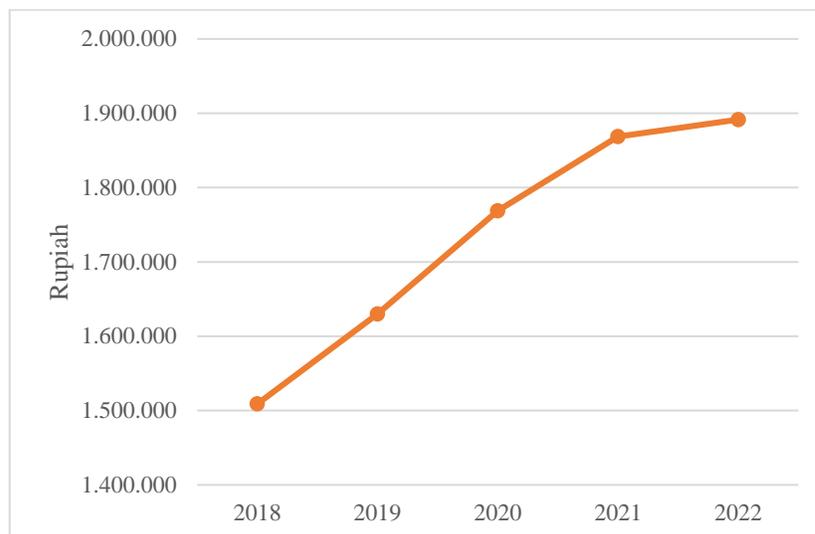
Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur Tahun 2018-2022 (Persen)

Berdasarkan data diatas, tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur mengalami tren menurun. Penurunan angka pengangguran tersebut karena kenaikan angkatan kerja di Jawa Timur sejalan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Namun pada tahun 2020 angkanya naik menjadi 5,84% karena adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan lumpuhnya beberapa sektor termasuk perekonomian, sehingga sebagian besar angkatan kerja tidak terserap bahkan banyak pekerja yang kehilangan pekerjaannya.

Faktor kedua adalah upah minimum yang juga berpengaruh terhadap kemiskinan. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999, Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Yang dimaksud dengan tunjangan tetap adalah suatu jumlah imbalan yang diterima pekerja secara tetap dan teratur pembayarannya, yang tidak dikaitkan dengan kehadiran ataupun pencapaian prestasi tertentu. Tujuan utama ditetapkannya upah minimum yaitu memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kebutuhan pokok, kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja.

Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Meningkatnya upah minimum dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat. Karena, untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat secara pribadi atau keluarga, rakyat harus melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah bekerja. Peran pekerja atau buruh, pengusaha, dan pemerintah sangat diperlukan dalam menyikapi dampak penetapan upah minimum. Dengan pengertian dan pemahaman serta kerja sama dari

semua pihak yang terkait dengan hubungan industrial ini, dapat dicapai tujuan bersama yaitu pekerja atau buruh sejahtera, perusahaan berkembang, serta pemerintah dapat menjaga perkembangan dan peningkatan perekonomian dengan baik (Kuswantoro & Dewi, 2016). Dari sisi lain, beberapa ekonom dan para pembuat kebijakan berpendapat bahwa mengurangi dan menghapus peraturan kebijakan upah minimum mampu menciptakan pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel serta menciptakan daya saing. Para ekonom yang setuju dengan pendapat ini memandang upah minimum menjadi penyebab kekakuan upah, memperlambat penciptaan lapangan kerja, serta berujung pada peningkatan pengangguran dan kemiskinan (Gindling & Terrell, 2010). Maka dari itu, upah minimum berpengaruh terhadap kemiskinan yang dapat kita lihat dari berbagai macam pendapat para ahli ekonomi. Berikut data upah minimum provinsi di Jawa Timur dalam 5 tahun terakhir.



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur (2022)

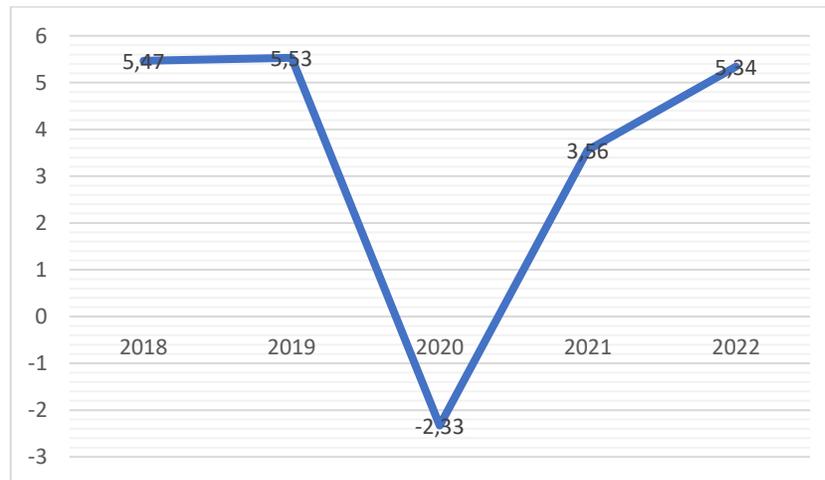
Gambar 1.3

Upah Minimum Provinsi di Jawa Timur Tahun 2018-2022 (Rupiah)

Berdasarkan data diatas, grafik tersebut menunjukkan Upah Minimum Provinsi Jawa Timur terus mengalami peningkatan dari Rp1.508.895 pada tahun 2018 menjadi Rp1.891.567 pada tahun 2022. Peningkatan upah minimum ini atas dasar kebijakan pemerintah daerah yang diberlakukan guna memicu minat masyarakat dalam bekerja. Selain itu, ada faktor penting yang sangat berperan dalam meningkatnya upah minimum provinsi yaitu karena kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, maka pemerintah mengambil kebijakan dalam peningkatan upah/gaji. Kenaikan upah berarti menaikkan tingkat kesejahteraan pekerja, sehingga upah berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan (Putri & Yuliarni, 2013).

Indikator lain yang mempengaruhi kemiskinan yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, namun pertumbuhan ekonomi yang lambat menyebabkan menurunnya kesejahteraan masyarakat dan munculnya berbagai permasalahan sosial yang mendasar. Mengingat jumlah penduduk yang terus bertambah yang berarti kebutuhan finansial juga semakin bertambah, maka diperlukan tambahan pendapatan setiap tahunnya.

Pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan, namun biasanya pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang dibutuhkan. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi yang baik pun tidak akan berarti bagi penurunan masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan pemerataan pendapatan. Berikut data pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur dalam 5 tahun terakhir.



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur (2022)

Gambar 1.4

Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur Tahun 2018-2022 (Persen)

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur mengalami peningkatan pada tahun 2018 hingga 2019 dan tahun 2021 hingga 2022. Namun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar -2,33% dikarenakan terjadinya pandemi COVID-19 yang membuat aktivitas ekonomi sangat terbatas. Munculnya pandemi berujung pada terjadinya penurunan pendapatan per kapita disebabkan semakin berkurangnya lapangan pekerjaan, kendala waktu kerja, dan penurunan produktivitas kerja. Penurunan pendapatan pekerjaan memiliki hubungan adanya pembatasan masyarakat dalam melakukan mobilitas perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19.

Provinsi Jawa Timur dipilih sebagai daerah kajian dalam penelitian ini dengan beberapa pertimbangan. Pertama, dalam lima tahun terakhir, data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Jawa Timur merupakan provinsi dengan pertumbuhan ekonomi

tertinggi di Pulau Jawa. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 5,34 persen, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara yang hanya mencapai 5,25 persen. Namun di sisi lain, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada tahun yang sama mencapai 4.181,29 jiwa (provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Pulau Jawa). Ini berarti meskipun laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mempunyai kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, namun peningkatan tersebut tidak selalu diiringi oleh penurunan kemiskinan secara signifikan. Kedua, jumlah penduduk yang begitu besar dan terus bertambah setiap tahun tidak diimbangi dengan pemerataan penyebaran penduduk. Selama ini sebagian besar penduduk masih terpusat di Pulau Jawa. Data sensus BPS tahun 2020 menunjukkan 56,10 persen atau sebanyak 151,59 juta orang dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 271,9 juta orang tinggal di Pulau Jawa. Dari jumlah tersebut, 27,43 atau 26,11 persen penduduk tinggal di Provinsi Jawa Timur yang merupakan provinsi kedua dengan jumlah penduduk terbesar setelah Jawa Barat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana perkembangan dan pengaruh tingkat pengangguran terbuka, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2022. Dimana tingkat pengangguran terbuka, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu bagian dari penentu keberhasilan atau tidaknya pemberantasan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa

Timur, sehingga penulis melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Determinan Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur Tahun 2006-2022**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Sebagaimana latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi secara parsial terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2022?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2022?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi, maka penulis menetapkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi secara parsial terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2022?
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2022?

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan bahan referensi yang dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu ekonomi pembangunan.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tidak hanya teori yang didapat selama kuliah namun juga dengan praktiknya langsung di lapangan, sehingga peneliti dapat menemukan perbandingan antara teori dan kenyataan langsung yang terjadi di lapangan.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tidak hanya teori yang didapat selama kuliah namun juga dengan praktiknya langsung di lapangan, sehingga peneliti dapat menemukan perbandingan antara teori dan kenyataan langsung yang terjadi di lapangan.

4. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai sumber untuk perkuliahan khususnya di Jurusan Ekonomi Pembangunan dan juga diharapkan memperkaya penelitian sejenis yang pernah diteliti sehingga dapat digunakan

oleh teman-teman mahasiswa sebagai bahan perbandingan jika mengadakan penelitian dengan permasalahan yang sama atau serupa.

5. Bagi Pihak Lain

Diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan kegunaan bagi peneliti lain sebagai bahan perbandingan juga petunjuk pada masalah yang serupa ataupun sebagai masukan bagi pihak lain yang membutuhkan.

1.5. Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Timur dengan mengakses *website* resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur dan Jawa Timur dalam angka.

1.5.2. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak diterbitkannya surat keputusan tentang pembimbing skripsi/tugas akhir. Adapun jadwal penelitian yang akan dilaksanakan dapat dilihat pada tabel.

